

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH  
STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**TESIS**



Oleh

**H A R U N S Y A H**

**NPM. 051801020**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2007**

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH  
STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**H A R U N S Y A H**

**NPM. 051801020**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi e-Government Pemerintah Daerah  
Studi Pada Pemerintah Kota Medan

**Nama** : Harunsyah

**NIM** : 051801020

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. M. Arief Nasution, MA**

**Pembimbing II**

**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Drs. Kariono, MA**

**Direktur  
Program Pascasarjana-UMA**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Juga shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang diterangi cahaya iman dan Islam.

Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Mengacu pada mata perkuliahan yang penulis ikuti didalam menimba ilmu pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan dipadukan dengan aktifitas keseharian sebagai praktisi di bidang pemerintahan selaku PNS di Pemko Medan serta berdasarkan hasil pengarahan dari kedua Bapak Dosen Pembimbing, maka tesis ini diangkat dengan judul : ***"IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN"***.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil. Untuk itu sudah sewajarnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

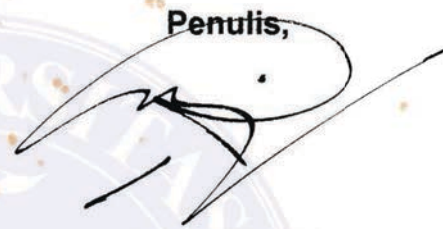
1. Bapak Drs. H. Abdillah, Ak. MBA, selaku Walikota Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Afifuddin Lubis, Msi, selaku Sekretaris Daerah Kota Medan yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

4. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Pasca Sarja Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. Kariono, MSi, selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan-bimbingan kepada penulis didalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Nasution, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan-bimbingan kepada penulis didalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Ir. H. Aswin Nurdin Nasution, selaku Kepala Dinas Infokom dan PDE Kota Medan yang banyak memberikan dukungan secara moril dan materil kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya tesis ini.
8. Bapak Ir. Qamarul Fattah, selaku Kepala Badan Litbang Kota Medan yang telah memberikan ijin penelitian dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, yang telah menuntun dan membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Administrasi Publik ini.
10. Para staf administrasi Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
11. Para staf Dinas Infokom dan PDE Kota Medan yang telah banyak membantu selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
12. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik yang telah membantu hingga selesainya penyusunan tesis ini.
13. Hj. Nurhani Ritonga, Ibunda tercinta yang senantiasa mendorong dan mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan, begitu pula selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini
14. Meiriana istri tercinta, Harrie Frayudha, Azizaz Noor Ridha, Dara Elsyah Iswara, dan M. Hazrie Fajar putra-putri tersayang, yang tak lupa mendoakan penulis agar senantiasa mendapat perlindungan dari-Nya.

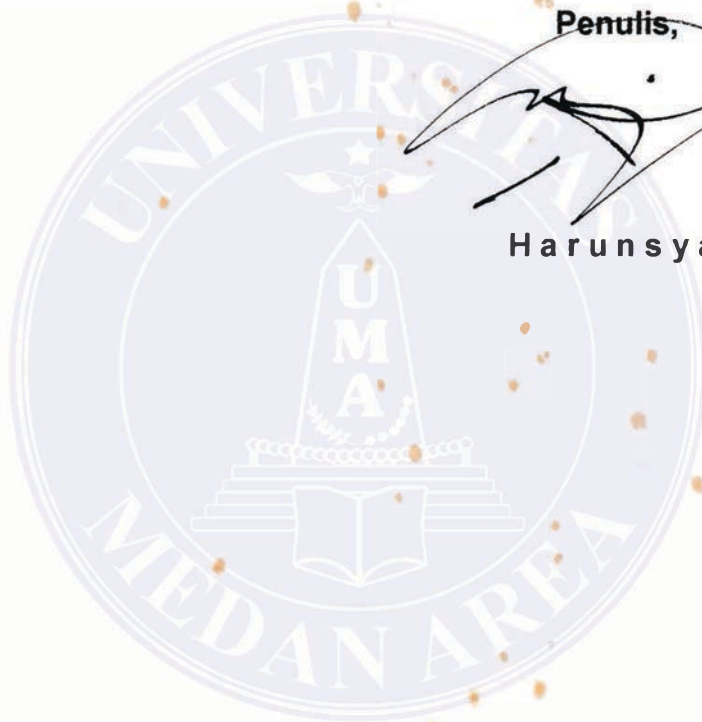
Atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu yang terkait dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

**Medan, 27 Maret 2007**

**Penulis,**



**Harunsyah**



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	7
1.6. Hipotesis .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	10
2.1. Model Komunikasi Program .....	12
2.3. Implementasi Kebijakan .....	17
2.4. Electronic Government (e-Government) .....	25
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>

3.1. Bentuk Penelitian .....	52
3.2. populasi Sasaran .....	52
3.3. Rencana Sampling .....	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya ...	53
3.5. Operasionalisasi Variabel .....	54
3.6. Teknik Analisa Data .....	56
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
4.1. Profil Kota Medan .....	58
4.1.1. Keadaan Geografis .....	59
4.1.2. Kota Medan Secara Demografis .....	60
4.1.3. Kota Medan Dalam Dimensi Sejarah .....	61
4.1.4. Kota Medan Secara Kultural .....	62
4.1.5. Kota Medan Secara Ekonomi .....	63
4.1.6. Kota Medan Secara Sosial .....	65
4.1.7. Kota Medan Sebagai Daerah Otonom Pemerintah Kota .....	67
4.1.8. Kewenangan Pemerintah Kota .....	70
4.1.9. Kemampuan Keuangan Daerah .....	71
4.1.10. Paradigma Baru Fungsi dan Peran Pemerintah Kota .....	74
4.1.11. Dinas Infokom dan PDE Kota Medan Sebagai Unit Kerja Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Kota Medan .....	76
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA .....</b>	<b>87</b>



5.1. Hasil Penelitian .....	87
5.2. Analisa Data .....	144
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>149</b>
6.1. Kesimpulan .....	149
6.2. Saran-Saran .....	150

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **ABSTRAK**

Pada saat pemerintah memberlakukan peraturan tentang otonomi daerah dengan berbagai ragam model dan mekanisme dalam perjalanan sejarah negara Indonesia menjadikan posisi studi kebijakan publik menjadi penting, terutama dalam proses implementasinya. Tesis ini mencoba mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan terutama tentang pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Medan No. 065/2502/SK Tanggal 6 Juli 2000 tentang Tim Pengkajian Komputerisasi Pemerintah Kota Medan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses Implementasi Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan dan mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam Implementasi Program e-Government pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang dipilih adalah para aparatur pengelola sistem informasi di beberapa satuan kerja berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang. Wawancara dilakukan pada responden terpilih diantaranya Kepala Dinas Infokom dan PDE Kota Medan, Sekretaris Bappeda Kota Medan, Anggota Tim Telematika Pemko Medan, dan masyarakat pengguna Teknologi Informasi Kota Medan yang dinilai tepat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas Infokom dan PDE Kota Medan sebagai satuan kerja pengelola sistem informasi beserta para aparatur pengelola sistem informasi selaku implementator di tingkat satuan kerja - sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Medan No. 065/2502/SK Tanggal 6 Juli 2000 tentang Tim Pengkajian Komputerisasi Pemerintah Kota Medan - kurang efektif dalam melaksanakan kebijakan ini, ini dapat dilihat dari indikator-indikator implementasi yang belum berjalan dengan baik. Perlu menjadi sorotan khusus agar jangan ada timbulnya kesan bahwa Program e-Government adalah kebijakan setengah hati dari Pemerintah Kota Medan, ini dapat dilihat dari belum tersosialisasinya program ini sampai ke tingkat aparat pelaksana, juga belum adanya kejelasan peraturan dan petunjuk di tingkat pelaksanaan maupun di tingkat teknisnya. Begitu pula dengan struktur birokrasi yang belum diberdayakan dengan baik sehingga sistem informasi yang terbangun menjadi parsial dan belum terintegrasi pada sebuah sistem e-Government yang terpadu. Kecenderungan dan perilaku sebagian pimpinan yang belum mendukung ke arah terciptanya Good Governance juga merupakan kendala yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan ini secara baik. Namun ada sisi lain yang cukup menggembirakan, yaitu era Teknologi Informasi yang demikian hebatnya secara eksternal cukup berpengaruh terhadap implementasi program ini, dimana secara suka atau tidak suka teknologi ini telah memasuki wilayah birokrasi melalui kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang berbasis sistem informasi sesuai dengan tuntutan zaman.

## **ABSTRACT**

At the time government goes into effect regulation concerning area of autonomy by various manner model and mechanism in Indonesia state way of history in a second study position public policy become importantly, especially in course of implementation. This thesis try to describe about policy implementation especially concerning implementation of execution of Medan Mayor Decesion Number : 065/2502/SK Date 6 July 2000 about Team of Analyza Computerize Medan Government.

This research lifts problems as follows : How implementation e-Government Program process in Medan Government with factors of becoming resistor and supporter in course of implementation. While research target is to describe implementation of e-Government Program in Medan Government and know factors of becoming resistor and supporter in course of implementation e-Government Program in Medan Government. This research use descriptive method with approach quantitative. Sample the selected is aparatus to manage the information system in work unity ammount 43 (fourty three) people. Circumstantial interview conducted to chosen respondent among others Head Official of Information Communication and Electronic Data Processing Medan Government, Secretary of Regional Plan and Development Agency, member Team of Analyza Computerize Medan Government, Information Technology User Medan Communitas precisely give required information.

Result of from this research is effectiveless that in general can be said that by Official of Information Communication and Electronic Data Processing Medan Government as work unity manager information system with manager information system aparatus in work unity -as written in Medan Mayor Decesion Number : 065/2502/SK Date 6 July 2000 about Team of Analyza Computerize Medan Government- effectiveless in implementation this policy, it can see from implementation indicators running goodless, this policy not yet socialization to till lowest government officer.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bersupremasi hukum. Kepentingan rakyat ditempatkan sebagai posisi sentral. Perubahan-perubahan tersebut muaranya adalah menuntut terbentuknya Good Governance dan Good Government dimana terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terlepas kepadanya reorganisasi, remanajemenisasi, dan reoperasionalisasi lembaga pemerintahan ke arah paradigma baru (reinventing government).

Sistem dan proses kerja yang tertutup, panjang dan berbelit-belit di kalangan lembaga pemerintah sudah amat melekat dimata masyarakat, sehingga timbul stereotip pemerintahan yang terlalu birokrasi dan kaku. Sistem dan proses kerja dengan mengintegrasikan kegiatan layanan dengan mengeliminir “redundant bureaucracy system” serta memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluhan dan kebutuhan warga untuk mengantisipasi perubahan yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Medan harus dapat mengembangkan sebuah sistem dan proses

kerja yang lebih akomodatif dan partisipatif untuk memfasilitasi keanekaragaman interaksi yang kompleks dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha, daerah lain, bahkan negara lain. Sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang sudah harus ditinggalkan dengan mengembangkan sistem manajemen modern yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali melalui penerapan organisasi berjaringan. Dinding pemisah yang selama ini terasa membatasi interaksi dengan sektor swasta perlu dicairkan melalui pembentukan kemitraan dengan dunia usaha (*publik-private partnership*). Solusi bagi semua itu tak lain adalah suntikan dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja dengan melaksanakan proses transformasi menuju e-Government.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Dalam rangka itu peningkatan pelayanan umum untuk kepentingan masyarakat merupakan prioritas. Untuk itu perlu pula diwujudkan peningkatan aspirasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, kebebasan memperoleh informasi, akuntabilitas yaitu sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoeprapto, K, 2001; ***Produktifitas Aktualisasi Budaya Perusahaan***, Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan, 2001 ; ***Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif***, Surabaya, Airlangga University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2002; ***Reformasi Birokrasi di Indonesia***, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta : UGM.
- Eko Indrajit Richardus, 2005 ; ***Electronic Government In Action***, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gomes, Faustino, Cardoso, 1995; ***Manajemen Sumber Daya Manusia***, Yogyakarta, Andi Offset.
- Jones, Charles O, 1996 ; ***Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)***, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto H.M, 2006 ; ***"Sistem Teknologi Informasi"***, Andi: Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2001 ; ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Mohammad, 1988 ; ***Metode Penelitian***, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soetopo, 1999; ***Kebijaksanaan Publik dan Implementasi***, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- Rahardjo Budi, 2005 ; ***Memahami Teknologi Informasi***, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Setiyadi Roes, Wigrantoro Mas, 2006; ***e-Government : Strategi Meraba Gajah***, Jakarta : Mastel.
- Sastropoetro, Santoso R.A; 1988: ***Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional***, Bandung : Alumni.
- Sugiyono, 1998; ***Metode Penelitian Administrasi***, Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi, 2005; ***Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial***, Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2002 ; ***Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus***, Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Offset.

Triwinarko Bambang, 2006 ; ***Komunikasi Perusahaan dan Hukum Telkom Divre III***, Bandung : Pikiran Rakyat.

Tjokromidjojo, Bintoro, 1974 ; ***Pengantar Administrasi Pembangunan***, Jakarta, LP3ES.

Wahab, Solichin Abdul, 1990; ***Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara***, Malang : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra, 1994; ***Evaluasi Kebijakan Publik***, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zoeltom, Rozy, 2006 ; ***Jalan Menuju Good Governance***, Jakarta : Majalah e-Indonesia.

---

\_\_\_\_\_, 1996: ***Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi***, Bandung, Ramadhan.

Republik Indonesia, 2000; ***Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004***.

Republik Indonesia, 2001; ***Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika Indonesia***.

Republik Indonesia, 2003; ***Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia***.

Republik Indonesia, 2003; ***Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.***

Republik Indonesia, 2003; ***Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.***

Republik Indonesia, 2004; ***Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah***, Jakarta: PT. Gramedia.

Republik Indonesia, 2004 ; ***Undang-Undang No : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah***, Jakarta, PT. Gramedia.

Departemen Dalam Negeri, 2000 ; ***Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/2371/Sj Tanggal 11 Oktober 1999 perihal Pembentukan dan Pemberdayaan Kantor PDE***

Kementerian PAN, 2000 ; ***Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 141/M.PAN/4/2000 Tanggal 20 April 2000 perihal Tim Koordinasi Telematika Indonesia.***

Pemerintah Kota Medan, 2003; ***Keputusan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2003 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Infokom dan PDE Kota Medan.***

Pemerintah Kota Medan, 1999 ; ***Kota Medan Pintu Gerbang Indonesia Bagian Barat- Edisi Keenam***, Medan: Bappeda Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan, 2002 ; ***Perda Kota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Medan***, Medan, Pemerintah Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan, 2003 ; ***Surat Keputusan Walikota Medan No. 065/650/K/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pemberdayaan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi (RIP-SI Pemko Medan).***

Pemerintah Kota Medan, 2000 ; ***Surat Edaran Walikota Medan No. 065/12173 tanggal 23 Agustus 2000 perihal Tata cara pengadaan dan pengembangan komputerisasi unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan.***



Pemerintah Kota Medan, 2002 ; Surat Edaran Walikota Medan No. 065/7465 tanggal 6 Mei 2002 perihal **Revisi Surat Edaran Walikota Medan No. 065/12173 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Tata cara pengadaan dan pengembangan komputerisasi unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan.**

Dinas Infokom dan PDE Kota Medan, 2006; **Rencana Strategis Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan Tahun 2006-2010.**

Dinas Infokom dan PDE Kota Medan, 2006; **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Infokom dan PDE Kota Medan Tahun 2005.**

Kantor Statistik Kota Medan, 2006 : **Medan Dalam Angka**, Medan: Bappeda Kota Medan